

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kurikulum

##### 1. Pengertian Kurikulum

Secara etimologis, istilah kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu *curir* yang artinya “pelari” dan *curere* yang berarti “tempat berpacu”. Istilah kurikulum berasal dari dunia olah raga, terutama dalam bidang atletik pada zaman Romawi kuno. Dalam bahasa Prancis, istilah kurikulum berasal dari kata *courier* yang berarti berlari (*to run*). Kurikulum berarti suatu jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari dari garis *start* sampai dengan *finish* untuk memperoleh medali atau penghargaan.<sup>1</sup>

Kurikulum secara fungsional merupakan sarana yang penting dalam menjamin keberhasilan proses pendidikan. Artinya tanpa kurikulum yang baik dan tepat, maka akan sulit tercapai tujuan dan sasaran pendidikan yang dicita-citakan.<sup>2</sup>

Menurut S. Nasution kurikulum dapat dipandang sebagai kurikulum tradisional dan kurikulum modern. Kurikulum tradisional sering diartikan sebagai mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Pemahaman ini agaknya masih dianut di kalangan masyarakat negara berkembang, termasuk Indonesia.

---

<sup>1</sup> Zainal Arifin, *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*, (Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 2.

<sup>2</sup> Abdulloh, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik*, (Jakarta: Gaya Media Prima, 1999), hlm. 3.

Sedangkan dalam konteks modern, kurikulum mempunyai pengertian yang tidak hanya terbatas pada mata pelajaran, tetapi menyangkut pengalaman diluar sekolah sebagai kegiatan pendidikan.<sup>3</sup>

Terma kurikulum memang mengandung banyak varian pemahaman di kalangan masyarakat pendidikan, dari pemahamn yang paling sempitn yang memahami kurikulum hanya sebagai rencana pelajaran yang ditempuh atau diselesaikan siswa guna mencapai suatu tingkatan tertentu, sampai kepada memahami sebagai aktivitasnyang menyangkut semua kegiatan yang dilakukan dan dialami peserta didik dalam perkembangan, baik formal maupun informal guna mencapai tujuan pendidikan <sup>4</sup>

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta bahan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.<sup>5</sup>

UU. No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu

---

3 S. Nasution, pengembangan Kurikulum, (Bandung: Citran Aditya Bakti 1993). Hlm. 9

4 Suyatno & Djihad Hisyam, Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Millenium III (Yogyakarta;Adicita2000). Hlm. 59.

5 Rusman, *Manajemen Kurikulum*, (Seri II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 3.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya kurikulum adalah semua kegiatan yang dirancang bagi terdidik untuk mencapai tujuan pendidikan . pengertian ini jauh lebih luas karena mencakup seluruh kegiatan intern dan ekstern siswa, baik yang berhubungan langsung dengan mata pelajaran baik kegiatan-kegiatan lain yang menunjang tercapainya tujuan pendidikan.

## **2. Jenis-jenis Kurikulum**

Seperti yang dikemukakan Sukmadinata paling tidak terdapat empat jenis kurikulum yang penting diketahui sebagai dasar melakukan pengembangan kurikulum kearah lebih baik dengan melihat perkembangan masyarakat yang semakin maju dan kompleks<sup>6</sup>

### **a. Kurikulum Subjek Akademik**

Jenis ini adalah jenis tertua karena digunakan sejak sistem sekolah pertama sekali diperkenalkan. Kurikulum ini berawal dari konsep pendidikan klasik seperti perrenaliasme dan essensialismeyang selalu berorientasi pada nilai-nilai masa lalu. Kurikulum ini lebih mengutamakan isi pendidikan . belajar adalah upaya menguasai ilmu sebanyak-banyaknya. Isi pendidikan diambil dari setiap disiplin ilmu yang berkembang.

---

6 Sukmadinata, Nana Syaodih, *Pengembangan Kurikulum : Teoridan Praktik*, (Bandung; Remaja Rosdakarya 2000).hlm.81-96

Karena jenis kurikulum ini lebih mementingkan pengetahuan, maka coraknya lebih bersifat intelektual. Bahkan nama-nama yang tercantum dalam kurikulum hampir sama dengan nama-nama disiplin keilmuan yang ada, seperti bahasa dan sastra, geografi, matematika, ilmu kealaman dan seterusnya.

Terdapat ciri khusus dari jenis kurikulum subjek akademis, apabila dilihat dari tujuan, metode, organisasi dan evaluasi. Tujuan jenis kurikulum ini adalah pemberian pengetahuan yang solid serta melatih siswa menggunakan *ise-ise* dan *proes* penelitian. Dengan menguasai berbagai disiplin keilmuan diharapkan siswa memiliki konsep-konsep dan cara yang dapat terus dikembangkan dalam masyarakat yang lebih luas.

#### b. Jenis Kurikulum Humanistik

Jenis kurikulum ini perancangannya lebih berpusat pada siswa, karena itu sering disebut dengan *learner based curriculum* dan memandang pengajaran lebih holistik di mana belajar difokuskan dengan arah yang jelas untuk membantu pengembangan potensi peserta didik secara utuh dan optimal. Pengembangan kurikulum ini menekankan pada pelayanan peserta didik menemukan makna dalam belajar sesuai tingkat pertumbuhan dan perkembangannya, serta mengakomodasi kebutuhan pengembangan kemampuan, minat, bakat dan kebutuhan-kebutuhan khusus peserta didik. Pendekatan ini

mengedepankan model interdisipliner atau integrated curriculum yang didasarkan pada psikologi humanistik dimana pengembangan individu (domain efektif) sama pentingnya dengan isi yang akan diajarkan. Guru sering mengacu pada “*teachable moment*” ketika peserta didik memperlihatkan minat khusus pada bidang pengetahuan tertentu, guru membimbing peserta didik dalam mengeksplorasikan topik/tema terhadap pembelajaran baru tersebut. pendekatan ini sekarang banyak digunakan dalam mengembangkan kurikulum dalam pengembangan kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), yaitu anak usia 3-4 tahun atau pendidikan TK-SD/MI kelas 1-3 dengan pembelajaran tematik, pelajaran IPS dan pelajaran IPA terpadu.<sup>7</sup>

c. Jenis Kurikulum Rekonstruksi Sosial

Kurikulum rekonstruksi sosial berbeda dengan jenis kurikulum yang telah dibicarakan sebelumnya. Kurikulum ini memusatkan perhatian pada problem sosial yang dihadapi masyarakat. Dasar pemikiran kurikulum ini lebih dekat dengan interaksional. Pandangan dasar jenis kurikulum ini adalah bahwa pendidikan bukanlah urusan pribadi tetapi kerja kolektif dan urusan bersama yang melibatkan guru, siswa, dan masyarakat.

---

<sup>7</sup> Muhaimin, Sutia dan Sugeng LP. Pengembangan Model KTSP pada Sekolah dan Madrasah (Jakarta; Rajawali Press 2008).hlm.8.

Ada beberapa ciri desain jenis kurikulum ini, antara lain bahwa asumsi dasar arah pengembangan kurikulum ini adalah rekonstruksi sosial sebagai tujuan utama, yaitu menghadapkan siswa pada tantangan, ancaman, dan hambatan –hambatan yang dihadapi manusia. Jadi perhatian jenis kurikulum ini lebih terfokus pada masalah-masalah sosial yang mendesak. Pola organisasi jenis kurikulum ini disusun seperti roda sehingga semua komponen dalam kurikulum saling berkaitan secara utuh. Komponen kurikulum rekonstruksi sosial terdiri dari tujuan dan isi kurikulum, metode dan evaluasi.

Pelaksanaan kurikulum rekonstruksi sosial banyajk dilaksanakan di daerah-daerah yang belum tentu tingkat ekonomi dan sosial.

#### d. Jenis Kurikulum Teknologi

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat global menghendaki adanya pola pengembangan kurikulum yang mengakomodasi perkembangan teknologi penting untuk diapresiasi.

Ada beberapa ciri kurikulum teknologis, diantaranya adalah jenis kurikulum ini tujuan diarahkan pada penguasaan kompetensi yang dirumuskan dalam bentuk perilaku. Metode yang dipertimbangkan dalam kurikulum jenis ini selalu diarahkan agar siswa memiliki kemampuan dasar untuk merespon perkembangan teknologi.

Organisasi bahan ajar jenis kurikulum teknologis dikembangkan dari berbagai disiplin ilmu dengan mengalami sintesis kreatif. Selanjutnya. Evaluasi jenis kurikulum ini dapat dilakukan setiap saat sebagai umpan balik, penyempurnaan satuan pelajaran dan seterusnya.

Pengembangan kurikulum teknologis memiliki beberapa kriteria, yaitu;

- a. Prosedur pengembangan kurikulum dinilai dan disempurnakan oleh pengembang kurikulum yang lain.
- b. Hasil pengembangan kurikulum yang berbentuk model harus dapat diuji coba ulang dan memberikan hasil yang lebih baik.

e. Jenis Kurikulum Hidden Kurikulum

Istilah *hidden curriculum* menunjuk kepada segala sesuatu yang dapat berpengaruh di dalam berlangsungnya pengajaran dan pendidikan, yang mungkin meningkatkan atau mendorong atau bahkan melemahkan usaha pencapaian tujuan pendidikan. Dengan kata lain, konsep hidden curriculum menunjuk pada praktek dan hasil persekolah yang tidak diuraikan dalam kurikulum terprogram atau petunjuk kurikulum kebijakan sekolah, namun merupakan bagian yang tidak teratur dan efektif mengenai pengalaman sekolah.

Hidden (ketersembunyian) merupakan aspek alamiah dalam hal yang berhubungan dengan pengalaman sekolah pertanyaan ini

perlu dimengerti dan dipahami oleh setiap pihak yang berkepentingan dengan pendidikan dan kurikulum. Namun pertama-tama seyogyanya kita mengerti apa arti hidden curriculum.

Kurikulum tersembunyi (*the hidden curriculum*) adalah kurikulum yang tidak direncanakan. Hilda Taba mengatakan “*curriculum is a plan for learning*”, yakni aktivitas dan pengalaman anak di sekolah harus direncanakan agar menjadi kurikulum. Ada juga yang berpendapat bahwa kurikulum sebenarnya mencakup pengalaman yang direncanakan dan juga yang tidak direncanakan, yang disebut kurikulum tersembunyi. Anak didik mempunyai aturan tersendiri sebagai reaksi terhadap kurikulum formal seperti tentang mencontek, membuat pekerjaan rumah, menjadi juara kelas, sikap terhadap guru, mencari strategi belajar yang efektif, dan banyak lagi hal lainnya.

Beberapa ahli pendidikan juga mencoba menelaah hidden curriculum. Seperti A. V. Kelly dalam buku *The Curriculum* menjelaskan bahwa,

Some educationist speak of the hidden curriculum, by which they mean those thing which pupils learn at school because of the way in which the work of the school is planned and organized, and through, the materials provided, but which are not in themselves overtly included in the planning or even in the consciousness of those



responsible for the school arrangements. Social roles, for example, are learnt in this way, it is claimed, as are s3x roles and attitudes to many other aspects of living. Implicit in any set of arrangements are the attitudes and values of those who create them, and these will be communicated to pupils in this accidental and perhaps even sinister way. This factor is of course of particular significance when the curriculum is planned and imposed by government.

“Beberapa ahli pendidikan berbicara tentang kurikulum tersembunyi, dengan apa yang mereka maksud dengan hal yang siswa pelajari di sekolah. Karena cara dimana pelajaran/pekerjaan sekolah yang direncanakan dan diatur melalui materi yang disediakan/diberikan, tetapi apa yang tidak ada pada diri mereka pada lahirnya termasuk dalam perencanaan atau meskipun kesadaran akan tanggung jawab pada susunan sekolah. Peran sosial, contohnya dipelajari dengan cara ini, itu diklaim sebagaimana peran dan sikap seseorang berdasar jenis kelamin terhadap aspek kehidupan lainnya. Implisit disetiap wacana/susunan yaitu sikap dan nilai yang membuatnya, dan ini akan disampaikan kepada siswa secara kebetulan atau mungkin dengan cara menakutkan. Faktor ini pasti berarti ketika kurikulum direncanakan dan ditentukan oleh pemerintah”.

Menurut Overly dan Valance, dalam Subandijah, hidden curriculum meliputi kurikulum yang tidak dipelajari, hasil

persekolahan non-akademik. Dalam kaitan ini, banyak para ahli kurikulum yang mengajukan konsepsi maupun pengertian hidden curriculum, misalnya:

Dreeben memfokuskan pada apa yang dipelajari di sekolah sebagai suatu fungsi struktur sosial kelas dan latihan otoritas guru.

Kohlberg mengidentifikasikan hidden curriculum sebagai hal yang berhubungan dengan pendidikan moral dan peranan guru dalam mentransformasikan standar moral.

Henry cenderung pada hubungan antara siswa dengan guru, aturan untuk mengatur hubungan tersebut dan peranan aturan ini dalam mendidik untuk kepatuhan (decolitas).

Kritisi sosial seperti Goodman, Friedenberg, Reiner dan Illich menggunakan konsepsi hidden curriculum sebagai aturan untuk mengidentifikasikan dan menjelaskan penguatan sekolah mengenai struktur kelas dan norma sosial tertentu.<sup>8</sup>

## **B. Manajemen Kurikulum**

### **1. Pengertian manajemen kurikulum**

Manajemen kurikulum adalah suatu system pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komperhensif, sistemik, dan sistematis dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Dalam pelaksanaannya, manajemen berbasis sekolah (MBS) dan kurikulum tingkat satuan pendidikan

---

<sup>8</sup> <https://www.referensimakalah.com> diakses pada 28/02/2019 – 14: 39

(KTSP). Oleh karena itu, otonomi yang diberikan pada lembaga pendidikan dalam mengelola kurikulum secara mandiri dengan memprioritaskan kebutuhan dan ketercapaian sasaran dalam visi dan misi lembaga pendidikan tidak mengabaikan kebijaksanaan nasional yang telah ditetapkan.

Keterlibatan masyarakat dalam manajemen kurikulum dimaksudkan agar dapat memahami, membantu, dan mengontrol implementasi kurikulum, sehingga lembaga pendidikan selain dituntut kooperatif juga mampu mandiri dalam mengidentifikasi kebutuhan kurikulum, mendesain kurikulum, mengendalikan serta melaporkan sumber dan hasil kurikulum, baik kepada masyarakat maupun pemerintah.

## 2. Ruang lingkup manajemen kurikulum

Manajemen kurikulum merupakan bagian integral dari kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Lingkup manajemen kurikulum meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum. Pada tingkat satuan pendidikan kegiatan kurikulum lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional (standar kompetensi/kompetensi dasar) dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan, sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun dengan lingkungan dimana sekolah itu berada.

## 3. Prinsip dan fungsi manajemen kurikulum

Terdapat lima prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum, yaitu :

- a. *Produktivitas*, hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Pertimbangan bagaimana agar peserta didik dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan tujuan kurikulum harus menjadi sasaran dalam manajemen kurikulum.
- b. *Demokratisasi*, pelaksanaan manajemen kurikulum harus beraskan demokrasi, yang menempatkan pengelola, pelaksana dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum.
- c. *Kooperatif*, untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum, perlu adanya kerja sama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat.
- d. *Efektivitas dan efisiensi*, rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum sehingga kegiatan manajemen kurikulum tersebut sehingga memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga, dan waktu yang relative singkat.

e. *Mengarahkan visi, misi dan tujuan* yang ditetapkan dalam kurikulum, proses manajemen kurikulum harus dapat memperkuat dan mengarahkan visi, misi, dan tujuan kurikulum.<sup>9</sup>

Selain prinsip-prinsip tersebut juga perlu dipertimbangkan kebijaksanaan pemerintah maupun departemen pendidikan, seperti USPN No. 20 tahun 2003, kurikulum pola nasional, pedoman penyelenggaraan program, kebijaksanaan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah, kebijaksanaan penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, keputusan dan peraturan pemerintah yang berhubungan dengan lembaga pendidikan atau jenjang/ jenis sekolah yang bersangkutan.

Dalam proses pendidikan perlu dilaksanakan manajemen kurikulum agar perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum berjalan dengan efektif, efisien, dan optimal dalam memberdayakan berbagai sumber belajar, pengalaman belajar, maupun komponen kurikulum. Ada beberapa fungsi dari manajemen kurikulum di antaranya sebagai berikut :

- a. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum, pemberdayaan sumber maupun komponen kurikulum dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang terencana dan efektif.
- b. Meningkatkan keadilan (*equality*) dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal, kemampuan yang maksimal dapat dicapai peserta didik tidak hanya melalui kegiatan intrakurikuler, tetapi juga perlu

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

melalui kegiatan ekstra dan kokurikuler yang dikelola secara integritas dalam mencapai tujuan kurikulum.

- c. Meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan, kurikulum yang dikelola secara efektif dapat memberikan kesempatan dan hasil yang relevan dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar.
- d. Meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran, pengelolaan kurikulum yang professional, efektif, dan terpadu dapat memberikan motivasi pada kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam belajar.
- e. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar, proses pembelajaran selalu dipantau dalam rangka melihat konsistensi antara desain yang telah direncanakan dengan pelaksanaan pembelajaran. Dengan demikian, ketidaksesuaian antara desain dengan implementasi dapat dihindarkan. Disamping itu, guru maupun siswa selalu termotivasi untuk melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien karena adanya dukungan kondisi positif yang diciptakan dalam kegiatan pengelolaan kurikulum.
- f. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu pengembangan kurikulum, kurikulum yang dikelola secara professional akan melibatkan masyarakat, khususnya dalam mengisi bahan ajar atau sumber belajar perlu

disesuaikan dengan ciri khas dengan kebutuhan pembangunan daerah setempat.<sup>10</sup>

### C. Perencanaan Kurikulum

Maksud dari majemen dalam perencanaan kurikulum adalah keahlian “*managing*” dalam arti kemampuan merencanakan dan mengorganisasikan kurikulum. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses perencanaan kurikulum adalah siapa yang bertanggung jawab dalam perencanaan kurikulum, dan bagaimana perencanaan kurikulum itu direncanakan secara professional.

Hal yang pertama dikemukakan berkenaan dengan kenyataan adanya gap atau jurang antara ide-ide strategi dan pendekatan yang dikandung oleh suatu kurikulum dengan usaha-usaha implementasinya. Gap ini disebabkan oleh masalah keterlibatan personal dalam perencanaan kurikulum. Keterlibatan personal ini banyak bergantung pada pendekatan perencanaan kurikulum yang dianut.

Pada pendekatan yang bersifat “*administrative approach*” kurikulum direncanakan oleh pihak atasan kemudian diturunkan kepada instansi-instansi bawahan sampai kepada guru-guru. Jadi *form the top down*, dari atas ke bawah atas inisiatif administrator. Dalam kondisi ini guru-guru tidak dilibatkan. Mereka lebih bersifat pasif yaitu sebagai penerima dan pelaksana di lapangan. semua ide, gagasan dan inisiatif berasal dari pihak atasan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

<sup>11</sup> Oemar H Malik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, (Cet. IV; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 150.

Sebaliknya pada pendekatan yang bersifat “*grass roots approach*” yaitu yang dimulai dari bawah, yakni dari pihak guru-guru atau sekolah-sekolah secara individual dengan harapan bias meluas ke sekolah-sekolah lain. Kepala sekolah serta guru-guru dapat merencanakan kurikulum atau perubahan kurikulum karena melihat kekurangan dalam kurikulum yang berlaku. Mereka tertarik oleh ide-ide baru mengenai kurikulum dan bersedia menerapkannya di sekolah mereka untuk meningkatkan mutu pelajaran.

#### **D. Organisasi Kurikulum**

Organisasi kurikulum adalah struktur program kurikulum yang berupa kerangka umum program-program pengajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Struktur program ini merupakan dasar yang cukup esensial dalam pembinaan kurikulum dan berkaitan erat dengan tujuan program pendidikan yang hendak dicapai.

Kurikulum lebih luas daripada sekedar rencana pelajaran, tetapi meliputi segala pengalaman atau proses belajar siswa yang direncanakan dan dilaksanakan di bawah bimbingan lembaga pendidikan. Artinya bahwa, kurikulum bukan hanya berupa dokumen bahan cetak, melainkan rangkaian aktivitas siswa yang dilakukan dalam kelas, di laboratorium, di lapangan, maupun di lingkungan masyarakat yang direncanakan serta dibimbing oleh sekolah. Suatu kurikulum harus memuat pernyataan tujuan, menunjukkan pemilihan dan pengorganisasian bahan pelajaran serta rancangan penilaian hasil belajar. Bahkan kurikulum harus merupakan bahan pelajaran atau mata pelajaran yang dipelajari siswa, program pembelajaran, hasil



pembelajaran yang diharapkan, reproduksi kebudayaan, tugas dan konsep yang mempunyai cirri-ciri tersendiri, agenda untuk rekonstruksi social, serta memberikan bekal untuk kecakapan hidup.

Salah satu aspek yang perlu dipahami dalam pengembangan kurikulum adalah aspek yang berkaitan dengan organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum merupakan pola atau desain bahan kurikulum yang tujuannya untuk memprmudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif.

Organisasi kurikulum sangat terkait dengan pengaturan bahan pelajaran yang ada dalam kurikulum, sedangkan yang menjadi sumber bahan pelajaran dalam kurikulum adalah nilai budaya, nilai social, aspek siswa dan masyarakat serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada beberapa factor yang harus dipertimbangkan dalam organisasi kurikulum, di antaranya berkaitan dengan ruang lingkup (*scope*), urutan bahan (*sequence*), kontinuitas, keseimbangan dan keterpaduan (*integrated*).<sup>12</sup>

#### **E. Pelaksanaan Kurikulum**

Pembinaan kurikulum pada dasarnya adalah usaha pelaksanaan kurikulum di sekolah, sedangkan pelaksanaan kurikulum itu sendiri direalisasikan dalam proses belajar mengajar sesuai dengan prinsip-prinsip dan tuntutan kurikulum

---

12 Rusman, *Op. Cit.* hlm. 60.

yang telah dikembangkan sebelumnya bagi suatu jenjang pendidikan atau sekolah-sekolah tertentu.

Pokok-pokok kegiatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 9 pokok kegiatan, yaitu :<sup>13</sup>

1. Kegiatan yang berhubungan dengan tugas kepala sekolah
2. Kegiatan yang berhubungan dengan tugas guru
3. Kegiatan yang berhubungan dengan murid
4. Kegiatan yang berhubungan dengan proses belajar mengajar
5. Kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler
6. Kegiatan pelaksanaan evaluasi
7. Kegiatan pelaksanaan pengaturan alat
8. Kegiatan dalam bimbingan dan penyuluhan
9. Kegiatan yang berkenaan dengan usaha peningkatan mutu professional guru.

Pelaksanaan kurikulum dibagi menjadi dua tingkatan yaitu pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah dan tingkat kelas. Dalam tingkat sekolah yang berperan adalah kepala sekolah, dan pada tingkatan kelas yang berperan adalah guru. Walaupun dibedakan antara tugas kepala sekolah dan tugas guru dalam pelaksanaan kurikulum serta diadakan perbedaan dalam tingkat pelaksanaan administrasi, yaitu tingkat kelas dan tingkat sekolah, namun antara kedua tingkat dalam pelaksanaan administrasi kurikulum tersebut senantiasa bergandengan dan bersama-sama bertanggungjawab melaksanakan proses administrasi kurikulum.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 169.

a. Pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah

Pada tingkatan sekolah, kepala sekolah bertanggung jawab melaksanakan kurikulum di lingkungan sekolah yang dipimpinnya. Kepala sekolah berkewajiban melakukan kegiatan-kegiatan yakni menyusun rencana tahunan, menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan, memimpin rapat dan membuat notula rapat, membuat statistic dan menyusun laporan.

b. Pelaksanaan kurikulum tingkat kelas

Pembagian tugas guru harus diatur secara administrasi untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kurikulum lingkungan kelas. Pembagian tugas-tugas tersebut meliputi tiga jenis kegiatan administrasi, yaitu :

- 1) Pembagian tugas mengajar
- 2) Pembagian tugas pembinaan ekstra kurikuler
- 3) Pembagian tugas bimbingan belajar

## **F. Pengembangan Kurikulum**

Pengembangan kurikulum harus dilandasi oleh manajemen berdasarkan pertimbangan-pertimbangan multidimensional, yaitu :

- 1) Manajemen sebagai suatu disiplin ilmu sangat erat kaitannya dengan disiplin ilmu-ilmu lainnya, seperti filsafat, psikologi, social budaya, sosiologi dan teknologi, bahkan ilmu manajemen banyak mendapat kontribusi dari ilmu-ilmu yang lain. Banyak teori, konsep dan pendekatan dalam ilmu manajemen memberikan masukan teoritik dan fundamental bagi pengembangan kurikulum. Itu sebabnya secara konseptual teoritik ilmu manajemen harus menjadi

landasan penting dalam pengembangan kurikulum. Hal ini tampak jelas kontribusi pengembangan fungsi-fungsi manajemen dalam proses pengembangan kurikulum, yang pada dasarnya sejalan dengan proses manajemen itu sendiri.

- 2) Para pengembang kurikulum mengikuti pola dan alur pikir yang sinkron dengan pola dan struktur berpikir dalam manajemen. Proses pengembangan tersebut sejalan dengan proses manajemen yakni kegiatan pengembangan dimulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, implementasi dan control serta perbaikan. Oleh sebab itu setiap tenaga pengembang kurikulum seyogyanya menguasai ilmu manajemen.
- 3) Implementasi kurikulum sebagai bagian integral dalam pengembangan kurikulum yang membutuhkan konsep-konsep prinsip-prinsip dan prosedur serta pendekatan dalam manajemen. Implementasi kurikulum menuntut pelaksanaan pengorganisasian, koordinasi motivasi, pengawasan, system penunjang serta system komunikasi dan monitoring yang efektif, secara berasal dari ilmu manajemen. Dengan kata lain, tanpa memberdayakan konsep-konsep manajemen secara tepat guna, maka implementasi kurikulum tidak berlangsung secara efektif.
- 4) Pengembangan kurikulum tidak lepas bahkan sangat erat kaitannya dengan kebijakan dibidang pendidikan, yang bersumber dari kebijakan pembangunan nasional, kebijakan daerah, serta berbagai kebijakan sektoral.

5) Kebutuhan manajemen di sector bisnis dan industry, misalnya kebutuhan tenaga terampil yang mampu meningkatkan produktivitas perusahaan, kebutuhan demokratisasi di lingkungan semua bentuk dan jenis organisasi, adanya perspektif yang menitikberatkan pada sector manusiawi dalam proses manajemen, serta berbagai perspektif lainnya. Pada gilirannya, memberikan pengaruh penting dalam kegiatan pengembangan kurikulum.

### **G. Evaluasi Kurikulum**

Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Kurikulum juga dirancang dari tahap perencanaan, organisasi kemudian pelaksanaan dan akhirnya monitoring dan evaluasi. Tanpa evaluasi, maka tidak akan mengetahui bagaimana kondisi kurikulum tersebut dalam rancangan, pelaksanaan serta hasilnya.

#### **1. Pengertian Evaluasi kurikulum**

Menurut S hamid, evaluasi kurikulum dan evaluasi pendidikan memiliki karakteristik yang tak terpisahkan. Karakteristik itu adalah lahirnya berbagai defenisi untuk suatu istilah teknis yang sama. Demikian juga dengan evaluasi yang diartikan oleh berbagai pihak dengan berbagai pengertian.hal tersebut disebabkan oleh filosofi keilmuan seorang yang berpengaruh terhadap metodologi evaluasi, tujuan evaluasi, dan pada gilirannya terhadap pengertian evaluasi.

Rumusan evaluasi menurut Gronlund adalah suatu proses yang sistematis dari pengumpulan, analisis dan interpretasi informasi/ data untuk

menentukan sejauhmana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Sementara itu, Hopkins dan Antes mengemukakan evaluasi adalah pemeriksaan secara terus menerus untuk mendapatkan informasi yang meliputi siswa, guru, program pendidikan, dan proses belajar mengajar untuk mengetahui tingkat perubahan siswa dan ketepatan keputusan tentang gambaran siswa dan efektivitas program.

Menurut Tyler, evaluasi berfokus pada upaya untuk menentukan tingkat perubahan yang terjadi pada hasil belajar. Hasil belajar tersebut biasanya diukur dengan tes. Tujuan evaluasi menurut tyler, untuk menentukan tingkat perubahan yang terjadi, baik secara statistic, maupun secara edukatif.<sup>14</sup>

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Masukan (input) adalah segala sesuatu sumber dan/atau daya yang diperlukan dalam sistem pendidikan untuk menciptakan hasil-hasil pendidikan. Proses adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk mengolah masukan pendidikan, seperti pembelajaran, pengembangan tenaga kependidikan, dan kurikulum. Output adalah salah satu jenis hasil pendidikan, ketika peserta didik belum sampai pada klasifikasi hasil pendidikan. Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan rencana untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dari suatu program atau kegiatan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam program atau kegiatan Selain itu, evaluasi dilakukan untuk

---

<sup>14</sup> *Ibid., Op. Cit*

menilai efisiensi, efektivitas, manfaat, dampak, dan keberlanjutan dari suatu program atau kegiatan. Efisiensi adalah pendayagunaan sumber-sumber pendidikan yang terbatas sehingga mencapai hasil yang optimal. Efektivitas adalah keberhasilan suatu organisasi pendidikan dalam mencapai tujuannya. Manfaat adalah nilai atau hasil lebih yang diperoleh dari hasil pendayagunaan sumber-sumber pendidikan yang sudah dilakukan. Selanjutnya, dampak adalah hasil atau keuntungan sebagai akibat dari program atau kegiatan yang dilaksanakan.

## 2. Tujuan Evaluasi Manajemen Kurikulum

Tujuan evaluasi adalah mengukur capaian kegiatan, yaitu sejauh mana kegiatan dapat dilaksanakan. Arikunto menyatakan bahwa agar pengukuran tujuan dapat diketahui secara cermat dan teliti sampai diketahui bagian mana dari kegiatan yang dapat diimplementasikan dan bagian mana yang tidak dapat diimplementasikan beserta penyebabnya sehingga tujuan evaluasi tersebut perlu dirinci. Untuk dapat mengadakan rincian terhadap tujuan evaluasi, evaluator harus mampu mengenali komponen-komponen kegiatan.<sup>15</sup>

Dengan melakukan evaluasi dapat diketahui sejauh mana tujuan pendidikan melalui komponen kurikulum telah dicapai. Depdiknas

---

15 Suharsimi Arikunto, *Evaluasi Program*, (Yogyakarta; Aditya Media, 1998), hlm. 3.

menjelaskan bahwa melalui evaluasi dapat meninjau ulang kemajuan pendidikan dan melakukan ikhtiar baru untuk mengembangkannya.<sup>16</sup>

Hasil evaluasi tidak bisa dinafikan dengan membiarkannya begitu saja sampai dilakukan kembali evaluasi berikutnya, harus ada tindak lanjut yang dilakukan sebagai wujud dari tanggung jawab dalam mengelola sekolah. Hasil evaluasi merupakan balikan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja sekolah. Fungsi utama dari kegiatan evaluasi, yaitu diagnosis, prediksi, seleksi, dan penetapan peringkat atau nilai dari tugas atau kegiatan yang telah dikerjakan.

Dalam konteks kurikulum, evaluasi kurikulum didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), proses, keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar kurikulum. Evaluasi kurikulum berfungsi untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dari suatu kurikulum yang diterapkan pada pendidikan. Evaluasi kurikulum bertujuan untuk menilai efisiensi, efektivitas, manfaat, dampak, dan keberlanjutan dari suatu kurikulum. Tujuan evaluasi kurikulum adalah mengukur capaian kurikulum, yaitu sejauh mana kurikulum dapat dilaksanakan.

---

<sup>16</sup> Depdiknas, *Manajemen Sekolah*. (Jakarta; pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, 2008) hlm,362.



### 3. Prinsip-prinsip Evaluasi Manajemen Kurikulum

Evaluasi kurikulum dilakukan dengan capaian tujuan kurikulum yang ditetapkan. Evaluasi kurikulum dilakukan melalui beberapa prinsip berikut.<sup>17</sup>

- a. Prinsip relevansi, artinya relevan antara pendidikan dengan tuntutan kehidupan. Prinsip relevansi berkaitan dengan tiga segi, yaitu relevansi pendidikan dengan lingkungan peserta didik; relevansi dengan perkembangan kehidupan masa sekarang dan masa depan; dan relevansi pendidikan dengan tuntutan dunia kerja.
- b. Prinsip efektivitas, artinya sejauh mana sesuatu yang direncanakan atau diinginkan dapat terlaksana atau tercapai. Prinsip efektivitas dapat ditinjau dari efektivitas mengajar dan efektivitas belajar peserta didik.
- c. Prinsip efisiensi, artinya perbandingan antara hasil yang dicapai (output) dan usaha yang telah dikeluarkan (input). Prinsip efisiensi dapat ditinjau dari waktu, tenaga, peralatan dan biaya.
- d. Prinsip kesinambungan, artinya saling hubung atau jalin-menjalin antara berbagai tingkat dan jenis pendidikan. Kesinambungan antara berbagai tingkat sekolah harus mempertimbangkan bahwa (a) bahan pelajaran pada tingkat sekolah selanjutnya hendaknya sudah diajarkan pada tingkat sekolah sebelumnya; dan (b) bahan pelajaran yang sudah diajarkan pada tingkat sekolah lebih rendah tidak perlu diajarkan pada tingkat sekolah

---

<sup>17</sup>Teguh Triwiyanto, *Op.Cit*, hlm.185

yang lebih tinggi. Kesenambungan antara berbagai bidang studi harus memperhatikan urutan penyajian dan terjalin dengan baik.

- e. Prinsip fleksibilitas, artinya ada ruang gerak yang memberikan kebebasan dalam bertindak (tidak kaku). Fleksibilitas mencakup fleksibilitas peserta didik dalam memilih program pendidikan, serta fleksibilitas pendidikan dalam mengembangkan program pembelajaran.

Evaluasi kurikulum merupakan proses komprehensif yang didalamnya meliputi pengukuran. Evaluasi pada hakikatnya merupakan suatu proses membuat suatu keputusan suatu nilai dari suatu objek. Keputusan evaluasi (*value judgement*) tidak hanya didasarkan pada hasil pengukuran (*qualitatif description*), dapat pula didasarkan pada hasil pengamatan (*qualitatif description*). Baik didasarkan pada hasil pengukuran (*measurement*) maupun bukan pengukuran (*nonmeasurement*) pada akhirnya menghasilkan keputusan nilai tentang suatu program/kurikulum yang dievaluasi.<sup>18</sup>

Permendikbud Nomor 159 Tahun 2014 menjelaskan bahwa evaluasi kurikulum adalah serangkaian kegiatan terencana, sistematis, dan sistemik dalam mengumpulkan dan mengolah informasi, memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk menyempumakan kurikulum.

#### 4. Pendekatan-pendekatan dalam Evaluasi Manajemen Kurikulum

Evaluasi kurikulum dilakukan melalui pendekatan, strategi, dan model evaluasi kurikulum sesuai dengan tujuan dan sasaran evaluasi. Pendekatan

---

<sup>18</sup> Rusman, *Op.Cit*, hlm 94

evaluasi kurikulum merupakan Cara pandang dalam mengevaluasi kurikulum, yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif

- a. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang menggunakan penilaian ahli berdasarkan kriteria sesuai dengan model yang diterapkan untuk memperoleh informasi dan data yang diperlukan.
- b. Pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan yang menggunakan instrumen yang sudah divalidasi sesuai dengan model yang diterapkan untuk memperoleh informasi dan data yang diperlukan.

Selain pendekatan, evaluasi kurikulum juga dilakukan dengan menggunakan strategi dan model evaluasi kurikulum. Strategi evaluasi kurikulum dilakukan secara deduktif atau induktif dengan langkah-langkah sistematis dan sistemik yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat dan valid. Sementara itu, model evaluasi kurikulum merupakan kerangka konseptual dan operasional yang digunakan untuk mengevaluasi perangkat dokumen, buku, pelatihan, pendampingan dan monitoring untuk kelancaran pelaksanaan pembelajaran.

Model evaluasi kurikulum yang digunakan dalam pendekatan kualitatif antara lain evaluasi bebas tujuan, analisis kesesuaian dan kesenjangan, studi kasus, iluminatif, dan responsive. Dalam pendekatan kuantitatif, model evaluasi kurikulum yang digunakan antara lain evaluasi berbasis tujuan, pendekatan sistem, dan penilaian akuntabilitas.

## 5. Fungsi Evaluasi Manajemen Kurikulum

Evaluasi kurikulum berfungsi sebagai upaya penyempurnaan kurikulum secara berkelanjutan pada tingkat nasional, daerah, dan satuan pendidikan.

Evaluasi kurikulum bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai:

- a. kesesuaian antara ide kurikulum dan desain kurikulum;
- b. Kesuaian antara desain kurikulum dan dokumen kurikulum;
- c. kesesuaian antara dokumen kurikulum dan implementasi kurikulum; dan
- d. kesesuaian antara ide kurikulum, hasil kurikulum, dan dampak kurikulum.

Ide kurikulum merupakan pikiran pokok kurikulum yang terdiri atas dasar filosofis, sosiologis, psiko-pedagogis, teoretis, yuridis, sistem, dan model kurikulum yang digunakan sebagai landasan dan kerangka pengembangan kurikulum. Rancangan perangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran disebut dengan desain kurikulum, yang dibuat untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sementara itu, yang dimaksud dengan dokumen kurikulum adalah sekumpulan dokumen yang berfungsi sebagai perangkat operasional kurikulum yang meliputi:

- a. Dokumen kurikulum setiap satuan pendidikan atau program pendidikan;
- b. Dokumen kurikulum setiap mata pelajaran;
- c. Pedoman implementasi kurikulum;
- d. Buku teks pelajaran;

e. Buku panduan guru, dan

f. Dokumen kurikulum lainnya.

Agar mencapai tujuan yang nyata, ide, desain, dan dokumen yang telah ditentukan harus diimplementasikan. Implementasi kurikulum merupakan proses realisasi desain kurikulum yang diterjemahkan dalam aspek-aspek penyediaan perangkat dokumen, buku, pelatihan, pendampingan, dan monitoring untuk kelancaran pelaksanaan pembelajaran. Implementasi dari ide, desain, dan dokumen diharapkan dapat menghasilkan perubahan dalam kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai capaian pembelajaran yang diwujudkan dalam bentuk kualitas pribadi dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Hasil tersebut diharapkan dapat berdampak pada perubahan sikap perilaku kolektif masyarakat di sekitarnya.

#### 6. Ruang Lingkup Evaluasi Manajemen Kurikulum

Evaluasi kurikulum dilakukan terhadap pengembangan dokumen kurikulum, implementasi kurikulum, hasil kurikulum, dan dampak kurikulum, berikut penjelasannya.

1. Pengembangan dokumen kurikulum dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kesesuaian antara substansi dokumen kurikulum dan desain kurikulum.
2. Evaluasi implementasi kurikulum dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kesesuaian antara implementasi kurikulum dan dokumen kurikulum. Evaluasi implementasi kurikulum mencakup:

- a. evaluasi implementasi kurikulum terbatas, yaitu evaluasi terhadap muatan atau mata pelajaran untuk tingkat kelas atau untuk satuan pendidikan tertentu, dan
  - b. evaluasi implementasi kurikulum penuh, yaitu evaluasi terhadap muatan pembelajaran atau mata pelajaran untuk seluruh tingkat kelas atau seluruh satuan pendidikan.
3. Evaluasi terhadap hasil kurikulum dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kesesuaian antara capaian pembelajaran dengan kompetensi inti dan standar kompetensi lulusan.
  4. Evaluasi dampak kurikulum dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai implikasi pemerolehan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik terhadap perubahan sikap perilaku kolektif masyarakat di sekitarnya.
7. Tahapan-tahapan Evaluasi Manajemen Kurikulum

Evaluasi kurikulum dilaksanakan oleh kementerian, kementerian agama, dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, Kantor wilayah kementerian agama, Kantor kementerian agama kabupaten/kota, komite satuan pendidikan/dewan pendidikan, satuan pendidikan, dan masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing. Dalam melaksanakan evaluasi kurikulum, terdapat beberapa tahapan yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Evaluasi reflektif dilakukan pada saat pengembangan dokumen kurikulum. Evaluasi reflektif digunakan untuk pengambilan keputusan perbaikan proses pengembangan dokumen kurikulum.
2. Evaluasi formatif, dilakukan setelah implementasi kurikulum secara terbatas atau secara penuh. Evaluasi formatif digunakan untuk pengambilan keputusan perbaikan implementasi kurikulum.
3. Evaluasi sumatif, dilakukan setelah implementasi kurikulum secara penuh paling sedikit lima tahun. Evaluasi sumatif digunakan untuk pengambilan keputusan penyempurnaan kurikulum.<sup>19</sup>

#### **H. Faktor Pendukung Evaluasi Kurikulum**

Implementasi kurikulum akan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sifatnya *internal* di lingkungan sekolah, ataupun faktor *eksternal* di luar sekolah. Secara umum beberapa faktor pendukung evaluasi kurikulum tersebut adalah sebagai berikut :<sup>20</sup>

1. Kepemimpinan dan Manajemen sekolah yang baik.  
Evaluasi kurikulum akan berhasil jika ditopang oleh kemampuan profesional Kepala Sekolah dalam memimpin dan mengelola sekolah secara efektif dan efisien, serta mampu menciptakan iklim organisasi di sekolah yang kondusif untuk proses belajar mengajar.
2. Kondisi sosial, ekonomi, dan apresiasi masyarakat terhadap pendidikan.

---

<sup>19</sup> Teguh Triwiyanto, Op.Cit, hlm.186-189

<sup>20</sup> Oemar Hamalik, *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum*, (Bandung; Pt. Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 98

Faktor eksternal yang akan turut menentukan keberhasilan evaluasi kurikulum adalah kondisi tingkat pendidikan orang tua siswa dan masyarakat. Kemampuan dalam membiayai pendidikan, serta tingkat apresiasi dalam mendorong anak untuk terus belajar.

3. Dukungan Pemerintah.

Faktor ini sangat menentukan efektivitas suatu evaluasi kurikulum dilaksanakan terutama bagi sekolah yang kemampuan orang tua/masyarakatnya relatif belum siap memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pendidikan. Alokasi dana pemerintah (APBN, APBD) dan pemberian kewenangan dalam pengelolaan sekolah menjadi penentu keberhasilan.

4. Profesionalisme.

Faktor ini sangat strategis dalam upaya menentukan mutu dan kinerja sekolah. Tanpa profesionalisme kepala sekolah, guru, dan pengawas akan sulit dicapai PBM yang bermutu tinggi serta prestasi siswa.

Dari faktor-faktor pendukung tersebut, maka dapat terlihat bahwa keberhasilan suatu evaluasi kurikulum akan berdampak pada aspek ketiga faktor tersebut dalam kerangka dua sudut pandang yaitu masalah sumber daya manusia dan masalah sistem. Masalah sistem, hasil evaluasi yang didukung oleh faktor-faktor tersebut memungkinkan munculnya sistem yang demokratis dan terbuka. Sedangkan dari sudut SDM hasil dari evaluasi kurikulum memungkinkan dihasilkannya kualitas dan sebaran informasi dari para ahli pengembangan kurikulum secara merata dan seimbang.

### **I. Faktor penghambat Evaluasi Kurikulum**

Norman dan Schmidt mengemukakan ada beberapa kesulitan dalam penerapan evaluasi kurikulum, yaitu :<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Norman, G.R, Schmidt H.G. *Effectiveness of problem based learning curricula: theory, practice and paper darts*, (Medical Education 2000), hlm.721



- a. Kesulitan dalam pengukuran, Dasar teori yang melatarbelakangi kurikulum lemah akan mempengaruhi evaluasi kurikulum tersebut. Ketidacukupan teori dalam mendukung penjelasan terhadap hasil intervensi suatu kurikulum yang dievaluasi akan membuat penelitian (evaluasi kurikulum) tidak baik.
- b. Kesulitan dalam penerapan randomisasi dan *double blind*. Kesulitan melakukan penelitian evaluasi kurikulum dengan metode randomisasi dapat disebabkan karena subjek penelitian yang akan diteliti sedikit atau kemungkinan hanya institusi itu sendiri yang melakukannya. Apabila intervensi yang digunakan hanya pada institusi tersebut maka timbul pertanyaan, “apakah mungkin mencari kelompok kontrol dan randomisasi?”. Selain itu intervensi pendidikan yang dilakukan tidak memungkinkan dilakukan *Blinded* Dalam penelitian pendidikan khususnya penelitian evaluasi kurikulum, ditemukan kesulitan dalam menerapkan metode *blinded* dalam melakukan intervensi pendidikan. Dengan tidak adanya *blinded* maka subjek penelitian mengetahui bahwa mereka mendapat intervensi atau perlakuan sehingga mereka akan melakukan dengan serius atau sungguh-sungguh. Hal ini tentu saja dapat mengakibatkan bias dalam penelitian evaluasi kurikulum.
- c. Kesulitan dalam menstandarkan intervensi dalam pendidikan. Dalam dunia pendidikan sulit sekali untuk menseragamkan sebuah perlakuan contohnya penerapan PBL yang mana memiliki berbagai macam pola penerapan.

Norman mengemukakan tidak ada dosis yang standar atau *fixed* dalam intervensi pendidikan. Hal ini berbeda untuk penelitian di biomed seperti pengaruh obat terhadap suatu penyakit, yang mana dapat ditentukan dosis yang *fixed*. Berbeda dengan penelitian evaluasi kurikulum misalnya pengaruh PBL terhadap kemampuan Self Directed Learning (SDL). Penerapan PBL di berbagai FK dapat bermacam-macam. Kemungkinan penerapan SDL dalam PBL di FK A 50 % , sedangkan di FK B adalah 70%, maka apabila mereka dijadikan subjek penelitian maka tentu saja pengaruh PBL terhadap SDL akan berbeda.

- d. Pengaruh intervensi dalam pendidikan mudah dipengaruhi oleh faktor-faktor lain sehingga pengaruh intervensi tersebut seakan-akan lemah.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Norman, G.R, Schmidt H.G. *Effectiveness of problem based learning curricula: theory, practice and paper darts*, (Medical Education 2000), p.721